

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan fungsi pemerintahannya pemerintah daerah tidak dapat terlepas dari keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan salah satu elemen yang penting yang dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Sejak adanya UU No. 22 Tahun 1999 yang kini telah di diganti menjadi Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan yang cukup luas dalam mengelola rumah tangganya sendiri, salah satunya pengelolaan keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya tuntutan tersebut, pemerintah daerah harus memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan optimal agar mampu mendukung pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pemenuhan layanan publik.

Untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal sehingga menciptakan tata kelola yang baik, maka pemerintah daerah harus mengadakan evaluasi secara berkala mengenai pencapaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Untuk dapat mengetahui sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, hal ini dapat dilihat melalui kinerja

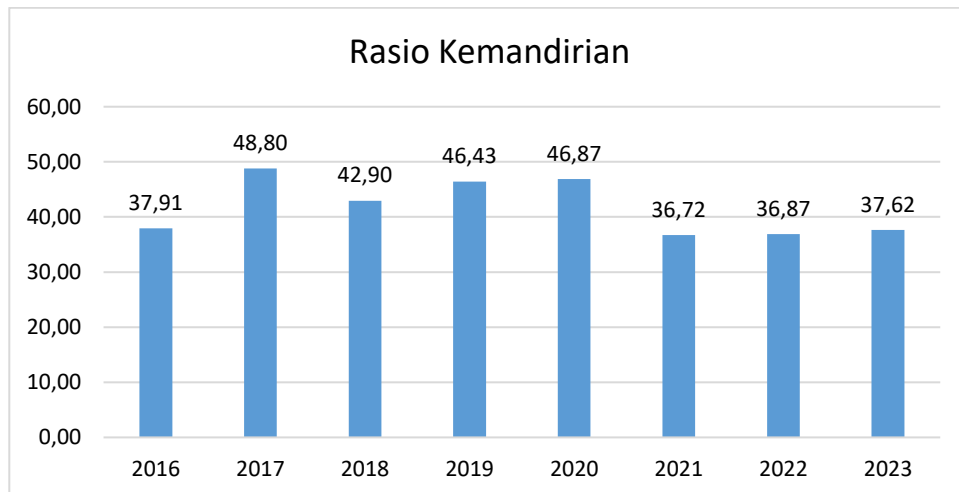
keuangannya. Kinerja keuangan pemerintah daerah memberikan gambaran hasil pencapaian di bidang keuangan daerah, termasuk belanja dan pendapatan daerah dalam suatu periode anggaran biasanya dalam kurun waktu satu tahun (Natoen et al., 2019).

Kinerja keuangan dapat diketahui dengan cara melakukan analisis terhadap laporan keuangan daerah. Pada dasarnya, analisis dilakukan untuk mengevaluasi kinerja di masa lalu, sehingga dapat diperoleh posisi keuangan yang mencerminkan realitas entitas dan potensi kinerja yang di masa yang datang (Nugroho dan Rohman 2012).

Dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, salah satu cara yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang berfungsi sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangannya (Verawaty et al. 2020). Di antara berbagai indikator keuangan yang ada, rasio kemandirian memegang peranan penting karena memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya keuangannya dalam memberikan layanan publik dan melaksanakan program pembangunan, sehingga mencerminkan kualitas kinerja keuangannya secara keseluruhan tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Kinerja keuangan daerah penting untuk diperhatikan karena berpengaruh langsung pada manfaat yang dirasakan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik (Senapan 2021). Dengan evaluasi kinerja keuangan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan strategis guna meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan kemandirian daerah.



Sumber: Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (Data diolah)

Gambar 1.1

Rasio Kemandirian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2023

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat melalui rasio kemandirian kinerja keuangan pada kab/kota Jawa Barat dari tahun 2016 sampai 2023 mengalami perubahan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, Jawa Barat mencatat rasio tertinggi sebesar 48, 80%, menunjukkan capaian yang relatif baik dalam membiayai kebutuhan daerah secara mandiri. Namun, tren ini tidak bertahan lama. Pada tahun-tahun berikutnya, terutama setelah 2020, rasio tersebut justru mengalami penurunan hingga ke angka terendah yaitu 36,72% di tahun 2021. Penurunan ini bisa dikaitkan dengan pandemi *covid-19* yang berdampak pada pendapatan daerah dan aktivitas ekonomi lokal. Setelah pandemi yang mereda, meskipun ada sedikit kenaikan di tahun 2023 tingkat kemandirian daerah masih belum kembali ke posisi saat sebelum krisis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah termasuk Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi besar

masih menghadapi tantangan serius dalam memperkuat kemampuan keuangannya sendiri dengan kata lain, peran pendapatan asli daerah, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah menjadi semakin penting untuk diteliti karena bisa memberikan gambaran tentang bagaimana cara mendorong kinerja keuangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan analisis dan evaluasi pengukuran kinerja keuangan dengan mengkaji faktor-faktor yang bisa menjadi celah yang signifikan guna memaksimalkan keuangan daerah (Maulina, Alkamal, dan Fahira 2021). Peran kinerja keuangan daerah sangat penting bagi pengelola dan para pemangku kebijakan sebagai masukan untuk perbaikan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan kinerjanya di masa depan.

Pemerintah daerah wajib menunjukkan kinerjanya keuangannya sebagai bentuk perwujudan transparansi dan akuntabilitasnya. Pemerintah daerah perlu memperlihatkan kemampuannya menggali sumber daya keuangan daerah dan harus memastikan bahwa sumber daya keuangan yang dimiliki digunakan dengan efektif, efisien, dan ekonomis sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat (Halim dan Kusufi 2021).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja modal. Ketiga aspek ini akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Ukuran pemerintah daerah merupakan besar kecilnya daerah yang dapat diprosikan dengan total aset yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran lebih besar dianggap lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan

operasionalnya dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta sumber daya yang lebih beragam sehingga mempermudah perolehan pendapatan asli daerah yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan apabila pemerintah daerah mampu mengelolanya dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Natoen *et al.* (2019) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta penelitian sebelumnya yang dilakukan Mulyani & Wibowo (2017), Nugroho & Prasetyo (2018), serta Sari dan Mustanda (2019) menunjukkan hasil penelitian bahwa ukuran pemerintah daerah namun berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Rioni (2019) menunjukkan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan dalam pembiayaan berkaitan dengan penyelenggaraan daerah. Pendapatan asli daerah mencerminkan kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk secara mandiri mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber daya dan potensi ekonominya sendiri, yang menunjukkan tingkat kemandirian dan mengurangi ketergantungan transfer keuangan dari pemerintah pusat. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber daya keuangannya sendiri. Keberadaan pendapatan asli daerah memiliki peranan yang sangat vital bagi suatu daerah karena dana yang diperoleh melalui mekanisme ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah secara mandiri, termasuk hal pelaksanaan program-program yang ditunjukkan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Sari dan Mustanda 2019). Semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya, termasuk memenuhi kebutuhan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sari (2016), terkait pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah, menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan Sari dan Halmawati (2021), Sari dan Mustanda (2019), Prastiwi dan Aji (2020) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Djuniar dan Zuraida (2018), Ratnasari dan Meirini (2022), menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, belanja modal juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kinerja keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dialokasikan untuk memperoleh aset tetap bagi pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Pengalokasian dana untuk belanja modal memiliki peran strategis dalam mendorong pemerintah daerah mengembangkan potensi yang dimiliki. Adanya optimalisasi investasi pada aset-aset produktif seperti infrastruktur, fasilitas pelayanan *publik*, maupun sarana pendukung akan membuka peluang untuk membuka sumber-sumber pendapatan baru, yang nantinya berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Andirfa *et al.*.

(2016), ketersediaan infrastruktur yang memadai di suatu daerah diharapkan dapat mendorong terciptanya efisiensi dalam berbagai sektor, sehingga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun fenomena yang terjadi berdasarkan statistik keuangan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat, struktur belanja kabupaten/kota dari tahun 2021-2023 struktur belanja daerah masih tetap didominasi oleh belanja operasi yakni mencapai 94,37% sedangkan belanja modal hanya sebesar 13,8%. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permatasari dan Mustanda (2018), Mulyani dan Wibowo (2017) menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Djuniar dan Zuraide (2018) serta Atmoko dan Khairudin (2022) menunjukkan hasil bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan kondisi dan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2016-2023).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2023?
2. Bagaimana pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2023 secara parsial maupun bersama-sama?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2023.
2. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2023 secara parsial maupun bersama-sama.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat digunakan sebagai bahan referensi penelitian yang dilakukan selanjutnya dan menjadi penambah ilmu pengetahuan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

- b) Penulis selanjutnya, sebagai referensi penelitian yang dilakukan selanjutnya mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.
- c) Penulis, sebagai pembelajaran serta bertambahnya ilmu yang sangat bermanfaat mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Membantu untuk memberikan masukan dan saran mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan tugas dan tanggungjawab pemerintah serta mengevaluasi pemerintah melalui kinerja keuangan pemerintah daerah.

b) Bagi Masyarakat

Membantu untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pemerintah daerah yang diukur dengan pengaruh ukuran daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja modal.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Data penelitian diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id).

1.5.2 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menyusun segala kegiatan penelitian yang terhitung mulai Februari 2023 hingga Juli 2025. Waktu penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 1.